

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2009). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan* (Edisi 1, hlm. 210–212).
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Makmur. (2015). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Refika.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosdakarya.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Sinar Grafika.
- Siagian. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Utomo, W. H. (n.d.). *Hukum Kepolisian Indonesia* (Edisi 1, hlm. 102–103). SMIK.
- Winarno. (n.d.). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan* (Cetakan keempat). Bumi Aksara.

Jurnal Ilmiah dan Karya Ilmiah

- Aulawi, D. F. (2022). *Divisi Propam Polri dalam sistem pengawasan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia* (hlm. 4). *Jurnal Kajian Keamanan dan Kepolisian*.
- Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2019). Tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa demonstrasi: Pengamanan atau pengekangan kebebasan berpendapat? *Padjadjaran Law Review*, 7(2).
- Eka Fitriana. (n.d.). Efektivitas penanganan pelanggaran disiplin oleh Bidpropam Polda Sumatera Selatan (Edisi 2, hlm. 51–53). *Jurnal Ilmu Kepolisian dan Etika Profesi*.
- Elvi Alfian. (n.d.). Tugas dan fungsi kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 27.
- Faldi, dkk. (n.d.). Optimalisasi peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumatera Barat... *UNES Law Review*, 5(4), 4820.
- Fathoni, M. (n.d.). Peran Divisi Propam dalam meningkatkan disiplin anggota Polri (hlm. 45). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*.
- Husni Imawan, A., dkk. (n.d.). Strategies to increase the competence of the Police Propam Division in enforcing discipline and ethics (hlm. 7). *Pena Justisia*.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (hlm. 256–257). Bayu Media Publishing.
- Ika Prasetya. (n.d.). Tinjauan yuridis terhadap fungsi Divpropam dalam penegakan Kode Etik Polri (Edisi khusus, hlm. 38). *Jurnal Hukum Pro Justitia*.

- Jayawista, K. P. (n.d.). Pengaturan hukum terhadap korban salah tangkap ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana. *Jurnal FH Universitas Udayana*, 14.
- Mardikid, J. D., dkk. (n.d.). Pertanggungjawaban pidana pelaku demonstrasi anarkis... *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara*, 3650.
- Muhammad Arif. (n.d.). Tugas dan fungsi kepolisian menurut UU No. 2 Tahun 2002. *Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan*, 95.
- Pajow, M. G. (2016). Perlindungan hukum terhadap korban penembakan oleh polisi dalam demonstrasi. *Lex Administratum*, 4(3), 4.
- Prasetya, I. (n.d.). Tugas dan fungsi Divpropam Polri dalam menegakkan kode etik profesi (hlm. 42). *Jurnal Hukum Pro Justitia*.
- Putri, R. S. D., dkk. (n.d.). Analisis perlakuan aparat terhadap hak asasi demonstran... *Jurnal Universitas*, 5.
- Riyanto & Akhmad, J. (n.d.). Evaluasi peran Propam dalam meningkatkan kedisiplinan personil. *Jurnal Riset Mahasiswa*, 309.
- Sugianto, dkk. (n.d.). Efektivitas pengamanan internal (Paminal) dalam penegakkan kode etik kepolisian. *Jurnal STIA Panca Marga Palu*, 85.
- Sukri, A. (n.d.). Implementasi kebijakan kepolisian terkait izin kegiatan masyarakat. Tesis, Universitas Daarul Islamic Centre Sudirman.
- Theresia, H. T. F. (2024). Tanggung jawab oknum kepolisian yang bertindak represif. *Lex Privatum*, 13(2).
- Utami, K. D. (n.d.). Demonstrasi di Semarang ricuh... *Kompas*.

Yoyok Uruk Suyono. (2013). *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Lasbang Grafika.

Yuldani, R. A. (n.d.). Kebebasan berpendapat dan pertanggungjawaban Kepolisian dalam penggunaan gas air mata. *Jurnal Hukum Universitas Jember*, 59.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (4).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Mabes Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan dan Pengamanan Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Sumber Internet / Laporan

- Afra, F. (2024). 5 jenis teknik pengumpulan data beserta pengertiannya. Kumparan. <https://kumparan.com/...>
- Aini, I. Q. (2025). Tindakan represif polisi: Batasan kewenangan... Portal Hukum. <https://portalhukum.id/...>
- Ajang Deni Mardikid. (2024). Aji Semarang macam represi aparat... Tempo. <https://tempo.co/...>
- Evi Purnawati. (n.d.). Perjalanan demokrasi Indonesia. *Jurnal FH Palembang*, 251–264.
- Galang Febriansyah & Abdul Khamid. (2021). Kebijakan negara terhadap demonstrasi mahasiswa... *Jurnal Ilmiah Nusantara*.
- Hukumonline. (2016). Peraturan Kapolri tentang demonstrasi dinilai bertentangan dengan UU.
- Komnas HAM. (2020). *Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Kode Etik Kepolisian dan Penggunaan Kekuatan*.
- Komnas HAM. (2025). *Catatan Tahunan HAM Indonesia 2024* (hlm. 45).
- Kontras. (2025). Brutalitas aparat bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. <https://kontras.org/...>
- Kristi Dwi Utami. (2025). Demonstrasi di Semarang ricuh... Kompas.
- LBH Jakarta. (2025). Kepolisian harus tunduk pada hukum! <https://bantuanhukum.or.id/...>
- Portal Slideshare. (2025). Struktur organisasi POLRI.

Sutiyo. (2023). *Perlindungan masyarakat...* PT Nas Media Indonesia.

Wawancara

Wawancara dengan Divisi Propam Polrestabes Semarang, 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan salah satu massa aksi, 29 Oktober 2025.